
THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN REPRODUCTIVE HEALTH SERVICES FOR ADOLESCENTS WITH MENTAL DISABILITIES IN KUDUS DISTRICT*Indayana Setiawati¹, Sukma Wardani²***ABSTRACT**

Background: Reproductive health is closely related to public health issues that need attention. Groups with disabilities are often considered to be more susceptible to reproductive risks among other sexual harassment. One of the health problems in disability related to sexual and reproductive health, including the lack of comprehensive knowledge about HIV (Human Immuno Deficiency Virus) and contraceptive knowledge. Preliminary study in Kaliwungu Disabled School Kudus show that students are not fully capable of maintaining reproductive health independently. This study aims to determine the role of government in reproductive health services in adolescents with mental disability in Kudus. **Purpose :** Knowing the role of the government in reproductive health services for adolescents with mental disabilities in Kudus Regency. **Research method:** This research uses qualitative descriptive research methods. The subject of this research is the health office of Kudus and Sidorekso Primary Health Care, triangulation of the source in Kaliwungu Disabled School Kudus and the parents of the holy Kaliwungu. The Data is subsequently processed and presented in a descriptive form. **Result:** The role of government in reproductive health services in adolescents with mental disability in Kudus. The government has played a role in accordance with Permenkes 2017 evidenced by the policies and programs of the health Office of Kudus conducted by the Primary Health Care regularly. But in the process of reproductive health services in adolescents with mental disabilities there is no difference with normal teenagers. **Conclusion:** Based on research that has been done obtained from observations, interviews, and documentation from research subjects and source triangulation was obtained that there was a government role in the reproductive health service in teenagers with mental disabilities in Kudus is a Primary Health Care programs PKPR, which is carried out routinely by Sidorekso Primary Health Care in the form of health counselling in the Kaliwungu Disabled School Kudus.

Keywords: The role of government, Teenagers, mental disability

Latar belakang: Kesehatan reproduksi sangat terkait erat dengan masalah kesehatan masyarakat yang perlu mendapat perhatian. Kelompok penyandang disabilitas seringkali dianggap lebih rentan terhadap risiko-risiko reproduksi antara lain pelecehan seksual. Salah satu permasalahan kesehatan pada penyandang disabilitas terkait kesehatan seksual dan reproduksi, diantaranya masih kurangnya pengetahuan komprehensif mengenai HIV (Human Immuno Deficiency Virus) dan pengetahuan kontrasepsi (HWDI,2015). Hasil studi pendahuluan di SLBN Kaliwungu Kudus menunjukkan bahwa siswa belum sepenuhnya mampu menjaga kesehatan reproduksi secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja dengan disabilitas mental di Kabupaten Kudus.**Tujuan Penelitian:**

Mengetahui Peran pemerintah dalam pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja dengan disabilitas mental di Kabupaten Kudus **Metode penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Dinas Kesehatan kabupaten Kudus dan Puskesmas Sidorekso, triangulasi sumber adalah SLBN Kaliwungu Kudus dan Wali Murid SLBN Kaliwungu Kudus. Data tersebut selanjutnya diolah dan disajikan dalam bentuk deskriptif. **Hasil penelitian:** Menunjukkan bahwa terdapat peranan pemerintah dalam pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja dengan disabilitas mental di kabupaten Kudus. Pemerintah sudah berperan sesuai dengan Permenkes tahun 2017 dibuktikan dengan adanya kebijakan dan program dari Dinas Kesehatan kabupaten Kudus yang dijalankan oleh Puskesmas secara rutin. Namun pada prosesnya pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja dengan disabilitas mental tidak ada perbedaan dengan remaja normal pada umumnya. **Kesimpulan:** Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dari subjek penelitian dan triangulasi sumber didapatkan bahwa terdapat peran pemerintah dalam pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja dengan disabilitas mental di Kabupaten Kudus yaitu berupa program Puskesmas PKPR (Program Kesehatan Peduli Remaja) yang dijalankan secara rutin oleh Puskesmas Sidorekso berupa penyuluhan kesehatan di SLBN Kaliwungu Kudus.

Kata kunci : Peranan Pemerintah, Remaja, Disabilitas Mental

Authors Correspondence

Midwifery Academy of Muslimat NU Kudus and indayanasetiawati@gmail.com

Published Online May 20, 2022

doi: -

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan nasional diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Pada periode 2015-2019, pembangunan

kesehatan diselenggarakan melalui Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi (Kemenkes 2017).

Menurut *World Health Organization* (WHO), lebih dari 1 miliar orang atau 15% dari populasi dunia, atau 1 dari 7 orang mengalami kecacatan, yaitu

antara 110 juta (2.2%) dan 190 juta (3.8%) orang yang berusia 15 tahun dan lebih tua, mengalami kesulitan dalam fungsi tubuhnya (WHO, 2016). Selain itu, diperkirakan bahwa 93 juta anak-anak atau 1 dari 20 anak usia di bawah 15 tahun, hidup dengan disabilitas sedang atau berat. Tingkat disabilitas meningkat sebagian dikarenakan penuaan usia dan kondisi kesehatan yang kronis, (WHO, 2015 dalam Kemenkes, 2017).

Kelompok penyandang disabilitas seringkali dianggap lebih rentan terhadap risiko-risiko reproduksi antara lain pelecehan seksual. Beberapa data statistik menunjukkan bahwa 80% dari wanita dan 50% pada pria tuna grahita mengalami pelecehan seksual sebelum usia 18 tahun (*Sexualityandu*) dalam Sari, 2018). Sejumlah 8% siswa laki-laki dan 26% siswa perempuan tunagrahita dan aktif secara seksual lebih mungkin terkena Infeksi Menular Seksual (IMS) dibandingkan dengan yang bukan tunagrahita. Tunagrahita merupakan kata lain dari retardasi mental yang berarti terbelakang secara mental. Istilah-istilah yang sering digunakan untuk mereka yang mengalami keterbelakangan mental antara lain lemah pikiran, cacat mental, defisit mental, bodoh, dungu, pandir (*imbecile*), dan sebagainya (Mangunsong, 2014).

Pembagian kelas dilakukan berdasarkan kategori umur bukan berdasarkan klasifikasi disabilitas. Di SLBN Kaliwungu 25% merupakan siswa tuna grahita (mental). Pada siswa SD dalam keseharian belum mampu mandiri, tetapi untuk siswa SMP dan SMA mampu mandiri dalam hal seperti berangkat ke sekolah sendiri dan sudah tidak ditunggu orang tua/ wali, namun dalam hal menjaga kesehatan reproduksi belum sepenuhnya mampu mandiri. Pemerintah melalui Puskesmas pernah melaksanakan penyuluhan kesehatan tetapi hanya sebatas kesehatan dasar seperti cuci tangan, sikat gigi dan obat cacing tetapi untuk fokus pada materi kesehatan reproduksi jarang dilakukan, padahal hal tersebut sangat dibutuhkan bagi siswa di SLBN Kaliwungu Kudus.

Keterangan dari pihak guru yang menjadi informan pada studi pendahuluan ini mengatakan bahwa siswa yang disabilitas mental atau tunagrahita dalam memperoleh pendidikan kesehatan masih bisa memahami apa yang diberikan. Tetapi pada praktiknya mereka masih sulit dan memerlukan bimbingan lebih lanjut, sehingga pemerintah perlu melakukan strategi khusus untuk memberikan pelayanan kesehatan reproduksi agar mampu diterima dan dalam praktiknya dapat dilaksanakan dengan mudah pada

remaja dengan disabilitas mental khususnya di SLBN Kaliwungu Kudus.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menafsirkan fenomena yang terjadi (Anggito, 2018). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, dimana penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai fenomena situasi tersebut (Sugiarto, 2015). Penelitian ini dilakukan di SLBN Kaliwungu pada bulan Mei sampai Agustus 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Subyek penelitian
 - a. Subjek penelitian 1 : Kepala Bagian Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Keluarga Kabupaten Kudus
 - b. Subjek penelitian 2 : bidan puskesmas Sidorekso
2. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja
 - a. Subjek penelitian 1
Pelayanan kesehatan reproduksi di kabupaten Kudus berpedoman pada Peraturan Kementerian Kesehatan RI no 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi yang

kemudian dari rencana strategi (renstra) pemerintah pusat dikemas dalam program-program inovasi yang dicanangkan di kabupaten Kudus yaitu melalui Puskesmas PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja) yang pelayanan berupa: posyandu remaja, pemeriksaan kesehatan remaja, pengobatan pelayanan klinis medis, pendidikan keterampilan hidup sehat, konseling atau curhat remaja, diskusi, pembinaan KKR (Kader Kesehatan Remaja), pelatihan konselor sebaya, penyuluhan kesehatan remaja, dan dialog serta pelayanan rujukan. Sejauh ini yang menjalankan program-program kesehatan reproduksi adalah tenaga kesehatan yang sudah memahami mengenai kesehatan reproduksi remaja. Menumbuhkembangkan perilaku hidup sehat dan pengenalan sistem reproduksi dilakukan melalui Puskesmas PKPR melalui kegiatan penyuluhan

- b. Subjek penelitian 2
Pelayanan kesehatan reproduksi di Puskesmas Sidorekso berpedoman pada Peraturan Kementerian Kesehatan RI dan kebijakan dari

Dinas Kesehatan kabupaten Kudus. Progam kesehatan reproduksi yang dijalankan adalah Penyuluhan kesehatan reproduksi, catin, posyandu remaja, pemeriksaan kesehatan remaja, pengobatan, KIE, diskusi dan pembinaan kader kesehatan remaja, penanganan masalah kesehatan reproduksi dan pelayanan rujukan. Pelayanan kesehatan reproduksi remaja dijalankan oleh tenaga kesehatan yang menguasai pelayanan kesehatan remaja sehingga tidak terdapat kesulitan. Menumbuhkembangkan perilaku hidup sehat dan pengenalan sistem reproduksi dilakukan melalui penyuluhan maupun posyandu remaja.

3. Kebijakan dan Pelayanan Kesehatan reproduksi Remaja Dengan Disabilitas Mental

a. Subjek penelitian 1

Pelayanan kesehatan remaja dengan disabilitas mental di kabupaten Kudus sama seperti pelayanan kesehatan reproduksi secara umum. Dinas Kesehatan kabupaten Kudus melalui Puskesmas tetap memberikan pelayanan kesehatan reproduksi

dasar dan dilakukan secara bertahap seperti: keterampilan hidup sehat, *personal hygiene*, pengajaran tentang perasaan malu, serta pembinaan kesehatan reproduksi agar remaja dengan disabilitas mental tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan, selain itu juga dilakukan pemberdayaan keluarga agar pelayanan kesehatan bisa diimplementasikan dengan baik oleh remaja dengan disabilitas mental secara mandiri. Tidak ada perbedaan khusus pelayanan yang diberikan akan tetapi jika tingkat disabilitas mental tidak dapat diberikan pelayanan maka dilakukan kolaborasi lintas sector yaitu dengan dinas sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, SLB yang ada di kabupaten Kudus dan rujukan ke psikolog. Selain itu peranan guru dan keluarga sangat penting karena yang sering bersama anak dengan disabilitas mental. Program peduli remaja di kabupaten Kudus dijalankan sejak tahun 2015 dan berjalan lancar sampai saat ini sesuai dengan target dari pemerintah. Pedoman

pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja dengan disabilitas mental di kabupaten Kudus berpedoman pada buku pelayanan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas. Materi pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja dengan disabilitas mental terdapat pada buku tersebut. Pada pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja disabilitas mental tidak terdapat perbedaan materi, hanya perbedaan ada pada teknis pelaksanaan yang diberikan lebih intensif, contoh pada pemberian pelayanan di Puskesmas lebih didahulukan. Tolok ukur keberhasilan program mengenai kesehatan reproduksi remaja dengan disabilitas mental melalui pencatatan dan pelaporan dari Puskesmas tentang pelayanan kesehatan reproduksi remaja secara umum tetapi dengan lembar form yang berbeda. Sampai saat ini berdasarkan pencatatan dan pelaporan tidak ditemukan masalah kesehatan reproduksi pada remaja dengan disabilitas mental. Akan tetapi pada kenyataan di lapangan tidak diketahui ada atau tidaknya

masalah kesehatan khusus. Sehingga sampai saat ini tidak ada program dalam mengatasi masalah pada remaja dengan disabilitas mental. Program pelatihan khusus juga belum diberikan hanya dilakukan pembinaan kepada tenaga kesehatan dan guru di lintas sektor secara bertahap

b. Subjek penelitian 2

Pada praktiknya pelayanan kesehatan reproduksi di kabupaten Kudus yang dilakukan oleh Puskesmas Sidorekso terfokus pada penyuluhan kesehatan remaja dengan disabilitas di SLB yang berada di wilayah kerjanya. Materi yang diberikan berupa pelayanan kesehatan keterampilan kesehatan diri yaitu: sikat gigi, cuci tangan, yang terfokus pada kesehatan reproduksi hanya mengenai *personal hygiene* seperti cara cebok, ganti pembalut.

4. Evaluasi pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Penyandang Disabilitas Mental

a. Subjek 1

Evaluasi pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas mental dilakukan melalui pencatatan dan pelaporan yang diberikan oleh Puskesmas berkenaan dengan

- pelayanan kesehatan reproduksi remaja pada umumnya. Untuk tindak lanjut pelayanan diserahkan kepada Dinas Kesehatan kabupaten Kudus. Tindak lanjut pelayanan yang dilakukan kembali jika pelayanan tersebut belum berhasil.
- b. Subjek 2
- Evaluasi pada pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja dengan disabilitas mental dilakukan dengan observasi mengenai kemandirian remaja dalam menjaga kesehatan reproduksi. Selain itu juga melalui wawancara pada keluarga dan guru di SLB diwilayah kerjanya. Sebagai tindak lanjut proses pelayanan diberikan materi yang sama apabila masih perlu pemahaman kembali.
5. Peran Puskesmas dalam pelayanan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas adalah sebagai berikut
- Melakukan pelayanan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas
 - Membangun kemitraan dengan organisasi profesi, institusi pendidikan, LSM atau pihak terkait lainnya untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas.
 - Menyediakan media KIE terkait komponen kesehatan reproduksi. Pencatatan dan pelaporan monitoring dan evaluasi
6. Hasil triangulasi baik sumber, data maupun metode, diperoleh bahwa mengatakan tidak terdapat perbedaan secara khusus dalam pemberian pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja dengan disabilitas mental, akan tetapi pada remaja dengan disabilitas mental frekuensi pemberian penyuluhan lebih sering dan pada pelayanan di Puskesmas didahulukan. Pada pelayanan kesehatan secara umum dilakukan tetapi kesehatan reproduksi secara khusus belum pernah dilakukan hanya sebatas menjaga kesehatan area genitalia, sehingga tidak ada kesenjangan keterangan dari berbagai sumber.
7. Keberhasilan pelayanan kesehatan reproduksi yang diberikan Puskesmas di SLBN Kaliwungu Kudus sebagian siswa sudah bisa menjaga kesehatan area genitalia secara mandiri seperti buang air kecil, cebok sendiri, dan SLB sudah terdapat kamar mandi terpisah antara perempuan dan laki-laki, tetapi saat wawancara dengan guru didapatkan hasil bahwa siswa

saat buang air kecil baik itu perempuan maupun laki-laki didampingi oleh guru yang sedang mengajar meskipun dari guru berbeda jenis kelamin terkadang guru laki-laki mengantarkan siswi perempuan ke kamar mandi, padahal siswi sudah kategori baligh. Sesuai dengan hasil tersebut masih memerlukan pengarahan pada guru SLB mengenai perbedaan seks dan gender tentang kesehatan reproduksi.

SIMPULAN

Terdapat peran pemerintah dalam pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja dengan disabilitas mental. Pemerintah sudah berperan sesuai dengan Permenkes tahun 2017 dibuktikan dengan adanya kebijakan dan program dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus yang dijalankan oleh Puskesmas secara rutin yaitu berupa Puskesmas PKPR (Program Kesehatan Peduli Remaja) yang dijalankan secara rutin oleh Puskesmas Sidorekso berupa penyuluhan kesehatan di SLBN Kaliwungu Kudus.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistika Kabupaten Kudus. (2016). *Data Penduduk Indonesia*. Kudus: Badan Pusat Statistika.

Anggito, A., dan Johan, S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak

Dimiyati, J. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Jakarta: Kencana.

Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). (2015). *Laporan Assessment Kesehatan Seksual and Reproduksi Perempuan Penyandang Disabilitas 2015*. Jakarta: HWDI.

Kemenkes RI. (2017). *Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Penyandang Disabilitas Usia Dewasa*. Jakarta: Kemenkes RI.

Mangunsong, F. (2014). *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Jilid Kesatu*. Depok: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3).

Sari, Merry M. (2018). *Gambaran Pengetahuan Orangtua Siswa Tunagrahita tentang Kesehatan Reproduksi Remaja di SLB C Tri Asih Jakarta*. Jurnal Kesehatan Hearty

Sugiarto, E. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta : Suaka Media

WHO. (2015). *WHO Global Disability Action Plan 2014-2021: Better Health for all People with Disability*.